

AKAD SUFTAJAH: PRAKTIK DAN PANDANGAN MAZHAB

Oleh: Iza Hanifuddin*

Abstract: *The happening of “Syariah” Funding Committee had to be pushed by transactional agreement to the variety of products. It was done to avoid imitating products that had been created by conventional funding committee. Inovation of product by this committee was also hoped that it could throw away negative opinion among society that could say that this committee just gave “Syariah” label to a specific product which was already in public market. Therefore, this study was done to push or to interest people to reexplore some other agreements that mostly could be found in classic fiqh hollybook.*

Kata kunci: *Suftajah, bill of exchange, wesel, sanad al-Sabb, financial notes*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perjalanan perkembangan bisnis syariah yang diawali oleh hadirnya lembaga keuangan Islam, seperti perbankan, asuransi, bahkan multilevel marketing, maka muncul pula semangat untuk menghadirkan berbagai produk dan bentuknya oleh para pegiat bisnis syariah ini. Oleh karena itu, setiap muncul produk baru harus dikritisi oleh berbagai kalangan, khususnya sarjana syariah terkait dengan nilai-nilai kesyariahannya itu sendiri dalam rangka mengawal penegakan *amar ma'rûf nahiy munkar* dalam rangka menjaga citra kesyariahan dan keislaman secara bersama. Baik buruknya bisnis Islami sangat digantungkan pada bagaimana peran Islami yang ditampilkan oleh penganutnya.

Produk syariah yang muncul biasanya hadir dengan mendasarkan

pada hasil kajian teks-teks Fiqh Muamalah yang secara praktis dipandang sebagai bisnis lama dan atau sebetulnya baru tapi lama tidak dipraktikkan oleh komunitasnya disebabkan faktor politik ekonomi yang didominasi oleh kekuatan di luar Islam yang sangat konvensional. Kendati lahir dari teks Fiqh Muamalah, kreasi dan inovasi telah dinampakkan oleh para pelaku bisnis dengan menggunakan Dewan Pengawas Syariahnya untuk memberikan fatwanya terhadap hasil kreasi dan inovasi tersebut untuk memenuhi aspek legalnya. Sejauh ini, belum diketahui adanya bisnis kreatif terbaru yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga bisnis yang ada kecuali dengan cara menjiplak dari produk bisnis konvensional dengan proses islamisasi di sana-sini atau memungut begitu saja yang sudah diputuskan oleh pandangan

* Penulis adalah Lektor Kepala dalam bidang Fiqh STAIN Batusangkar

ulama yang ada dalam berbagai kitab fiqh klasik. Untuk aspek yang terakhir ini, kemampuan menggali teks yang berbahasa Arab mutlak diperlukan. Hampir sulit ditemukan orang yang dipandang ahli dalam bidang tersebut dari kalangan pebisnis syariah karena hampir semua atau rata-rata mereka merupakan "lulusan" konvensional *hatta* DPS-nya sendiri yang seringkali dicomot dari sisi ketokohan dan jabatannya saja demi mendongkrak popularitas lembaga. Padahal, semua sepakat bahwa lembaga bisnis Islam tidak boleh statis atau *jumûd* dalam menghasilkan berbagai produk bisnis syariah ini karena ia mesti menuju kesempurnaan sebagaimana Islam yang dijadikan filosofi lahirnya lembaga ini juga sempurna.

Kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab diyakini menyimpan khazanah begitu banyak dan variatif produk bisnis yang bisa dipelajari lebih lanjut dan ditelusuri secara seksama untuk diaplikasikan dalam bisnis hari ini agar tidak punah begitu saja. Saat ini sudah terdengar pernyataan berbagai pihak yang mengatakan bahwa bisnis syariah itu *murâbahah* ke *murâbahah* saja, *mudhârabah* ke *mudhârabah* saja dengan ungkapan sekenanya, yaitu *mudahrebah*, dan pastinya tanpa pengetahuan yang akurat tentang hal itu. Untuk itu, percepatan penggalian informasi tentang berbagai bisnis dalam kitab kuning mutlak diperlukan dan pengkajian ulang tentang bisnis-bisnis tersebut juga merupakan keharusan karena dunia dulu yang tergambarkan dalam kitab kuning tentu sudah jauh berbeda dengan dunia sekarang

yang penuh persaingan bisnis konvensional. Dan bisnis syariah pun sedang merangkak.

Berikut ini, penulis akan mencoba mengungkap salah satu bisnis yang ada dalam kitab kuning yang barangkali bisa menjadi salah satu alternatif untuk dikaji lebih lanjut dan dicari kemungkinan penerapannya dalam praktik bisnis hari ini, yaitu: "*Akad Suftajah*"

PENGERTIAN DAN BENTUK PELAKSANAAN SUFTAJAH

Ungkapan kata terkait bisnis ini ada tiga, yaitu *suftajah* sebuah kata yang paling banyak dipakai dalam berbagai buku sebagaimana diungkapkan oleh al-Akhfasy. Dua kata yang lain, yaitu *saftajah*, dan *suftujah* sebagaimana digunakan oleh Sibawayh. Perkataan *suftajah* ini berasal dari bahasa Persia yang diakulturasikan ke dalam bahasa Arab. Bahasa aslinya ialah *suftah/saftah/suftuh* yang berarti sesuatu yang pasti (*muhkam*) dalam kaitan bisnis harta. Secara istilah *suftajah* ialah *form* atau catatan yang ditulis oleh seseorang untuk diberikan kepada seseorang yang mau menyerahkan sejumlah harta untuk dimiliki dan dijamin penyerahannya kembali oleh pihak ke tiga di negara lain yang telah ditentukan atas perintah orang yang membuat *form* atau catatan (Kementerian Wakaf dan Agama, 1970: 207). Definisi *suftajah* dalam versi Arabnya ditulis oleh Kementerian Wakaf dan Agama (1970: 209), yaitu:

معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في
 بلد ليوفيه المقرض أو نائبه أو دائته في بلد
 آخر معين

Transaksi ekonomi di mana seseorang memberi hutang/harta kepada orang lain dalam satu negeri agar nanti dibayarkan kembali melalui wakilnya atau seseorang yang berhutang kepadanya di negeri lain yang ditentukan

Abdul Halim Muhammad mendefinisikannya sebagai kepingan kertas, buku atau cek yang ditulis oleh seseorang kepada wakilnya atau orang yang memiliki hutang padanya dan sedang berada di negeri lain yang isinya berupa perintah pembayaran jumlah uang tertentu kepada seseorang yang ditunjuk dalam kepingan kertas tersebut atau jumlah yang sama dengan hutangnya di negeri tersebut. Menurut beliau, penamaan *suftajah* karena disamakan dengan praktik penyimpanan kepingan uang dinar dan dirham dalam tabung berongga pada sebuah tongkat yang dalam istilah Arab disebut dengan tabung *suftaj* (Abdul Halim Muhammad, 2008: 147). Pemakaian istilah ini menjadi meluas karena ketika itu setiap orang hampir melakukan cara yang sama dalam menyimpan uang dalam perjalanan. Tabung *suftaj* menjadi cara yang aman dalam menyimpan uang sekalian bertongkat dalam perjalanan.

Kekuatan bisnis ini adalah pada adanya *form* atau catatan pembayaran hutang yang dipandang sebagai surat berharga. Sebelum ini

tidak pernah ada surat yang dinilai berharga dilihat dari sisi nominalnya. Sejak adanya praktik *suftajah* ini mulailah dikenal istilah surat berharga. Bahkan, untuk menyatakan bahwa apakah selembarnya dinilai mahal, orang Arab suka mengungkapkan dengan pernyataan *kutubuhu safâtij!* sehingga dikenallah istilah *suftajah* (al-Syrâziy, tth: 1/113)

Pelaksanaan akad *suftajah* ini bisa digambarkan sebagai berikut: "Si A hendak pergi merantau untuk keperluan bisnis di negara orang. Tapi, ia khawatir dalam membawa harta atau uang kontan yang relatif banyak. Ia khawatir akan dirampok dalam perjalanan atau jatuh di jalan atau lainnya yang tidak terduga. Demi menghindari bahaya atau kemungkinan lain yang ditemukan nanti dalam perjalanan, si A menyerahkan sebagian harta atau uangnya kepada si B yang saat itu mempunyai piutang kepada si C yang sedang tinggal di negara yang hendak dituju si A. Maka, si B pun bersedia untuk menerima penyerahan uang atau sebagian harta si A tersebut dan bersedia pula membuat jaminan pembayarannya berupa catatan/surat penagihan hutang (*form*) yang akan diterima oleh si A untuk menjadi bukti pengambilan pembayaran dengan jumlah yang sama melalui si C yang sedang berada di negara yang hendak dituju oleh si A. Dengan demikian, secara pasti (*muhkam*) uang atau harta itu akan sampai dan aman dari bahaya perampokan atau bahaya kehilangan.

Pelaksanaan *suftajah* dalam praktiknya bisa terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Penyerahan oleh Si A diniatkan sebagai modal kerja (*qardh/qirâdh*) dengan perjanjian diserahkan sendiri oleh penerima modal kepada seseorang (pihak ketiga) yang ditunjuk oleh si A di negara tertentu. Dengan demikian, dimungkinkan Si A masih bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil dari si penerima modal yang bisa diambil sewaktu-waktu (setelah pulang) (Ibn Âbidîn, tth.).
2. Penerima modal menyerahkan sendiri secara langsung kepada pemilik modal di negara tempat merantaunya sewaktu-waktu. Hal ini dimungkinkan karena keduanya sebetulnya sama-sama ingin merantau, sedang penerima modal masih memerlukan tambahan modal atau harta tambahan sebelum merantau.
3. Penyerahan modal kerja ke seseorang dan menyuruhnya agar pengembaliannya nanti diserahkan kepada seseorang (agen) agar dikirimkan kepadanya (pemilik modal) di negara tempat rantauannya. Di sini ada sesuatu yang disyaratkan sebagaimana dalam ungkapan al-Kamal ibn al-Hammâm *al-suftajah al-masyrûthah naqlan min al-wâqi'ât* (salah satu syarat dalam akad *suftajah*, yaitu kemestian terhindar dari bahaya kerampokan atau kehilangan) dan termasuk akad bersyarat yang dilarang.
4. Penyerahan modal dilakukan dalam satu negara dan penerima modal meminta kepada agen atau perwakilannya yang ada di ne-

gara lain untuk melakukan pembayaran modal yang sama kepada pemberi modal suatu saat. Dalam konteks ini, pemberi modal dan penerimanya sama-sama tidak merantau.

5. Seseorang yang memiliki harta di negara lain menyuruh wakil/ agennya untuk memberikan sejumlah harta kepada seseorang dengan ketentuan si penerima harus menyerahkan kembali suatu saat nanti kepada pemilik di negara tempat ia berada nantinya (Kementerian Wakaf dan Agama, 1970: 207-208).

Dari uraian di atas tergambar bahwa ketika ada pihak ke tiga seperti pada nomor satu, akadnya bisa dikategorikan sebagai akad *hiwâlah* (pengalihan hutang), sedang yang lain adalah dapat dikategorikan sebagai *qardh/qirâdh* (hutang atau pinjaman yang dimanfaatkan untuk modal kerja). Oleh karena itu, para penulis terbelah dalam dua bab ini di saat membahas bab *suftajah*, ada yang memasukkan ke dalam *kitâb al-hiwâlah* dan ada yang memasukkan ke dalam *bâb al-qardh*. Namun, ada yang menilai pula bahwa *suftajah* adalah *hiwâlah mustanidah*, yaitu *hiwâlah* yang digantungkan pada *qardh*. Artinya adanya keuntungan akan dibagi. Tapi, ketika ada kerugian tidak ditanggung bersama karena dipandang *hiwâlah*.

Ulama lain yang turut memberikan contoh praktik *suftajah*, yaitu Shadr al-Syariah. Beliau memberikan contoh praktik *suftajah* ini sebagai berikut: Seseorang memberikan uang kepada seorang peniaga secara hutang supaya ia nanti dapat memberikan hutang ini kepada kawannya

di negeri lain. Imam Nawawi juga memberikan contoh lain yaitu surat yang ditulis oleh penghutang kepada naib atau wakilnya yang berada di negeri lain untuk pemiutang supaya dia membayar hutangnya (Abdul Halim Muhammad, 2008: 148).

PANDANGAN MAZHAB TENTANG SUFTAJAH

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana pandangan mazhab terkait dengan akad *suftajah* ini, yaitu:

1. Hanafiyah memandang akad *suftajah* ini makruh, baik manfaat yang dituju itu sebagai yang dimaksudkan atau yang disyaratkan. Hal ini karena keumuman hadis *kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa ribâ*. Selain itu, Hanafiyah juga melihat adanya hadis yang melarangnya. Kendati demikian hadis tersebut dinilai lemah oleh Ibn Ma'in, Bukhariy, dan Nasâiy. Bunyi hadis tersebut adalah *السفجات حرام*. Imam Abû Hanifah sendiri menilainya haram, yaitu *makrûh tahrîm* sesuai logika *Ushûl Fiqh*-nya (Ibn al-Hammâm, 1319 H.: 5/452).
2. Sebagian Syafi'iyah melarang *suftajah*. Sedang Dhâhiri (Ibnu Hazm) yang didukung oleh Mazhab Imamiyah membolehkan *suftajah* karena tidak termasuk dalam kategori *akhdzu ziyâdah* (mengambil tambahan) atau *jarru manfa'ah* (mengambil manfaat) meskipun diakui bahwa terdapat bisa membahayakan (al-

Halliyy, tth: 2/6, Ibn Hazm, 1350 H: 7/78).

3. Mâlikiyah dan Ibâdhiyah melihat bahwa maslahat dan manfaat *suftajah* bagi kedua belah pihak sangat besar maka ia boleh dilakukan sejauh tidak mendatangkan madharat dalam pelaksanaan setelah itu. Semua dalam rangka menjaga *hifdz al-mâl* guna memperoleh maslahat harta, yaitu agar tidak dirampok atau hilang. Oleh karena itu, menghindari bahaya perjalanan dipandang sebagai prinsip *hifdz al-mâl*, bukan *jarr al-manfa'ah*. Tapi, jika tujuan yang diharapkan dari akad *suftajah* untuk mengurangi berat beban yang harus dibawa dalam perjalanan saat merantau, maka dipandang tidak termasuk prinsip *dharûrah*. Kalau alasan ini yang dijadikan dasar, maka *suftajah* dilarang (Kementerian Wakaf dan Agama, 1970: 211)
4. Mazhab Hanabilah memiliki pendapat yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang mengharamkan secara mutlak. Pandangan yang terkuat adalah boleh sebagaimana dianut oleh Ibn Taymiyyah. Beliau memandang bahwa akad ini termasuk akad *tabarru'* dan *husnul-qadhâ'* (sebaik-baik penerapan). Dalam *al-Mughnîy* Ibnu Qudâmah (tth: 4/320) menjelaskan bahwa 'Athâ', Ibn Zubayr, Ibn 'Abbâs, 'Aliy, Ibn Sîrîn, dan al-Nakhâiy membolehkan *suftajah* ini karena dilihatnya memiliki kemaslahatan pada kedua belah pihak yang berakad dan tidak ada madharatnya,

apalagi keharamannya tidak disebutkan atau dijelaskan dalam nash al-Quran dan Hadis secara tegas. Ketika keadaan sedemikian rupa adanya, maka berlakulah hukum mubah. Ibn al-Qayyim dalam kitabnya (tth: 1/391) juga berpegang pada kebolehan akad ini dengan prinsip masalahat tersebut. Dicontohkan bahwa Ibn Zubayr pernah melakukan transaksi *suftajah* ini dengan memberikan beberapa dirham kepada penduduk Mekah lalu meminta (menuliskan) catatan (*suftajah*) kepada mereka agar diserahkan kepada Mus'ab Ibn Zubayr yang tinggal di Irak.

PRAKTIK ULAMA DAN TANTANGAN PELUANG BISNIS SUFTAJAH HARI INI

Jika diumpamakan dalam konteks budaya kita, praktik *suftajah* dapat dimisalkan sebagai berikut: "Seseorang (si A) memiliki uang di Jakarta yang dipegang oleh seseorang yang lain (si B). Ketika si A berada di Jogjakarta dia berutang kepada seorang "Jogja" (si C). Lantas, si A menulis surat kepada pemegang hartanya si B agar menyerahkan sejumlah uang sebagai pelunasan utang kepada pemegang surat (si C) manakala pemegang surat tiba di Jakarta." Cara ini pada zaman dahulunya digunakan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kejahatan atau kehilangan uang di tengah perjalanan antara Jogjakarta sampai Jakarta.

Praktik *suftajah* seperti ini, mengutip kitab *Sunan al-Kubrâ* karya al-Bayhaqi, pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, 'Aliy bin

Abî Thâlib, Ibnu 'Abbâs, Abdullah bin Zubayr, dan Ibnu Sirrin. Ibnu Zubayr pun pernah meminjam uang kepada sejumlah orang di Mekkah. Beliau kemudian menulis surat yang ditujukan kepada Mush'ab bin Zubayr yang berada di Irak. Orang-orang yang mengutangi Ibnu Zubayr lantas mengambil pelunasan utang dari Mus'ab bin Zubayr. Kejadian ini ditanyakan kepada Ibnu 'Abbâs dan beliau pun menilainya tidak bermasalah. Demikian pendapat Mâlikiyah (*Mushannaf 'Abd al-Razzâq*, 8: 140 dan *al-Dzâkhirah*, 5: 293). Secara tekstual, apa yang dilakukan oleh Ibn Zubayr dinyatakan sebagai berikut:

فقد كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق ، فيأخذونها منه ، فسئل عن ذلك ابن عباس ، فلم ير به بأسا

Suftajah ini juga banyak dipraktikkan pada zaman Abbasiyyah (Tahun 749 s/d 1258 M). Cara ini berfungsi untuk mengumpulkan pajak dari daerah-daerah yang harus dikirim kepada kerajaan pusat. Ia menjadi seperti instrumen bank bagi negara ketika itu jika dikaitkan dalam konteks ekonomi pemerintahan saat ini.

Suftajah sangat berkaitan langsung dengan praktik *hiwâlah*. Praktik ini telah membantu para pihak dalam memberi jalan mudah mengelola dan mengurangi risiko pengiriman uang. Meski demikian, ulama tetap berbeda pandangan. Sebagian melihat hal ini dilarang karena berkaitan dengan hutang piutang yang mengandung unsur riba di balik keuntungan yang di-

dapat di mana setiap hutang piutang yang mengambil keuntungan atau manfaat adalah riba. Sedangkan Imâm Mâlik, lebih bersikap fleksibel dalam menggunakan *suftajah* dalam aktifitas bisnis. Imâm Mâlik menggunakan *suftajah* atas dasar *dharûrah*. Sebab, praktik ini untuk menghindari risiko kehilangan uang atau harta ketika dalam perjalanan. Ulama Mazhab Hambaliy, seperti Ibnu Taymiyyah, Ibnu al-Qayyim, dan Ibnu Qudâmah memandang keuntungan atau manfaat *suftajah* akan dinikmati oleh kedua belah pihak, baik kreditor atau pun debitor. Untuk ini, *suftajah* menjadi dibolehkan (Majlis Penasehat Syariah Suruhanjaya Sekuriti, 2003: 32-34). Ibn Mundzir membolehkan *suftajah* karena ada kemaslahatan di kedua belah pihak, yaitu pemberi *suftajah* karena uangnya aman dan penerima *suftajah* karena bisa menjadikannya sebagai modal (Ibn Qudâmah, t.th.: 4/360).

Suftajah menjadi masalah bagi ulama ketika ia disamakan dengan akad *qardh* atau hutang piutang. Dalam fiqh, akad *qardh* dinilai sebagai akad *tabarru'* atau akad yang bersifat tolong menolong. Oleh karena itu, dalam akad ini tidak boleh diberlakukan syarat apa pun. Ia mesti bersifat murni karena ikhlas kepada Allah Swt. Setiap persyaratan yang diberlakukan dianggap telah merusak akad dan bertendensi riba. *Suftajah* dikategorikan sebagai akad *qardh* karena bernuansakan pinjam meminjam. Padahal, ia sedikit berbeda dengan *qardh* karena inisiatif datang dari pihak yang

memberi hutang demi menjaga hartanya dari kemungkinan hilang karena jatuh atau dirampok dalam perjalanan niaga. Hal inilah yang kemudian dipandang sebagai syarat dalam akad. Selain daripada itu, ia dianggap bertentangan dengan hadis yang berbunyi *kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa ribâ* (setiap pengambilan manfaat atau keuntungan dari hutang ialah riba). Padahal, berbeda dengan hutang (*qardh*), *suftajah* masih mungkin untuk di *mudhârabah*-kan dengan cara mencampurkan modal *suftajah* dengan modal pemegang *suftajah* ('Alâ' al-Dîn al-Samarqandiy, 1984: 3/22). *Suftajah* dibolehkan asal bukan dimaksudkan sebagai *qardh* atau *dayn* yang diper-syaratkan keuntungannya. Oleh karena itu, akad *suftajah* dibolehkan dalam konteks *mudhârabah* ('Alâ' al-Dîn Abû al-Hasan 'Alîy bin Sulayman al-Mardawiy al-Dimasyqiy al-Shâlihiy, 1419 H.: 5/310).

'Abd al-Hakam membolehkan *suftajah* karena *dharûrah* demi menjamin harta. Oleh karena itu, selama harta dipegang oleh pemegang *suftajah*, pemegang hakikatnya berhak mendapat jaminan upah (*mu'nah*) dan tanggungan (*kafâlah*) selama ia membawa harta *suftajah* tersebut (Syihâb al-Dîn Ahmad bin Idris al-Qarâfiy, 1994: 5/293). Pada harta *suftajah* berlaku *dhimân* (jaminan harta) jika akad *suftajah* disetujui, sedangkan orang yang bersedia menjadi wakil dalam konteks *suftajah* berlaku *kafâlah* (jaminan jiwa) (Zaynuddîn bin Ibrâhîm bin al-Nujaym, t.th., 6/237).

Hiwâlah dibolehkan dalam Islam, baik dengan syarat maupun tanpa syarat dengan ketentuan *ujrah al-fi'liy*. Tapi, jika tanpa *muqâbil* (syarat di awal) akad ini akan diistilahkan sebagai *hiwâlah muthlaqah* atau *suftajah* dalam istilah Hanafiy, sedangkan *hiwâlah* yang menggunakan syarat di awal dikategorikan sebagai akad *wakâlah bi ajrin* (*Qarârât wa Tawshiyât al-Majma' al-Fiqh al-Islâmiy*, 1/137). *Suftajah* hukumnya mubah dan tidak bisa disamakan dengan riba yang keuntungan transaksi utang piutang hanya dinikmati oleh pihak yang mengutangi. *Suftajah* tidak demikian adanya. Berdasarkan hal tersebut, arisan yang memiliki sifat menguntungkan orang yang mengutangi dan yang berutang hukumnya jelas diperbolehkan. Namun, pendapat Mâlikiyah yang melarang keuntungan dalam transaksi utang piutang meski yang diuntungkan dalam hal ini adalah kedua belah pihak kecuali *dharûrah*, maka arisan di zaman ini adalah karena kebutuhan yang sangat mendesak disebabkan karena sedikitnya orang yang mau memberi pinjaman uang tanpa riba. Mayoritas orang sangat membutuhkan solusi keuangan mereka dengan cara berutang. Menghadapi kondisi ini ada dua pilihan, uang arisan atau berutang kepada bank ribawi.

Suftajah di zaman ini bisa disamakan dengan *balûshah/bulîshah*/tukar menukar valuta asing atau *qarthaqah* (Zaynuddîn bin Ibrâhîm bin al-Nujaym, tth., 17/301; Syams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahmân al-Tharâbalsiy al-Maghribiy, 2003: 6/523). *Suftajah* dalam bahasa Arab modern juga disebut dengan *sanad*

al-sahb (Rizquallah Antaki, 1965). *Suftajah* adalah surat berharga atau cek pembayaran. Ia berasal dari bahasa Persi yang di-Arabkan menjadi *saftah* yang berarti kertas atau catatan *watsîqah*. Ia juga bisa disamakan dengan *musharrafah* atau cek perdagangan. Hanya saja, dalam konteks mata uang kertas hari ini (*fulûs*) yang mesti diperhatikan adalah *tsamani sûq al-balad* meskipun dianggap murah. *Suftajah* dalam bahasa bisnis modern mungkin bisa disamakan dengan proses transfer uang, baik melalui *bill of exchange*, *wesel*, *telegraphic transfer* (TT), *postal order*, *money order* atau dalam dunia pasar modal boleh disamakan dengan *financial notes*. Namun, jika praktik ini benar seperti *suftajah* tentu harus lebih dikaji lebih mendalam agar paling tidak bisa diamati perspektif dan legalitasnya menurut syariah. Bagaimana pun, praktik ini lebih banyak digunakan oleh ekonomi konvensional atau bermula dari kerja-kerja konvensional. Tentu tidak ada salah untuk dikaji lagi lebih mendalam hal spesifik apa yang bisa ditawarkan oleh Islam melalui *suftajah* ini.

PENUTUP

Demikian gambaran umum tentang *suftajah* ini untuk dapat dikaji sebagai sebuah pengantar guna mendapatkan informasi lebih detil dari berbagai kajian untuk bisa diaplikasikan dalam praktik bisnis syariah hari ini. Kajian ini masih sebatas teoritis, tetapi bermula dari sini diharapkan dapat menghantarkan pada kajian kritis untuk menemukan produk yang cocok dalam ekonomi syariah yang relevan de-

ngan ini. Paling tidak, produk konvensional yang selama ini diduga sama dengan *suftajah* bisa dikritisi

kesahihan praktiknya berdasarkan perspektif ini dan merubahnya sesuai alternatif syariah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ala' al-Dîn Abû al-Hasan 'Aliy bin Sulayman al-Mardawiy al-Dimasyqiy al-Shâlihiy, *al-Inshâf Fî Ma'rifati al-Râjih Min al-Khilâf 'Alâ Madzhabi al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiy, 1419 H
- 'Alâ' al-Dîn al-Samarqandiy, *Tuhfah al-Fuqahâ'*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984
- Abdul Halim Muhammad, 2008, *Undang-Undang Muamalat dan Aplikasinya Kepada Produk-Produk Perbankan Islam*, Selangor Darul Ehsan: Aras Mega (M), Sdn. Bhd.
- al-Halliy, *Tadzkirah al-Fuqahâ'*, Iran: al-Maktabah al-Murtadhiyah, tth.
- al-Syirazy, *al-Muhadzdzab*, ttp.: al-Bâbiy al-Halabiy, tth.
- Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'Alâ al-Durr al-Mukhtâr*, ttp.: al-Âmiriyah al-Kabîr, tth.
- Ibn al-Hammâm, *Fath al-Qadîr*, ttp.: al-Maymuniah, 1319 H.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyy, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Damaskus: Thab'ah al-Munir al-Dimasyqiy, tth.
- Ibn al-Qudâmah, *al-Mughnîy*, ttp.: al-Manâr al-Tsâniyah, tth.
- Ibn Hazm, *al-Muhallâ*, ttp.: al-Munîriyyah, 1350 H
- Ibn Qudâmah, *al-Syarh al-Kabîr*, Jil. 4
- Majlis Penasehat Syariah Suruhanjaya Sekuriti, *Resolutions of The Securities Commission Syariah Advisory Council*, Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 2003
- Menteri Perwakafan dan Keagamaan, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah Fî al-Hiwâlâh*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Agama, 1970
- Qarârât wa Tawshiyât al-Majma' al-Fiqh al-Islâmiy, 1/137
- Rizqullâh Antaki, *al-Suftajah aw Sanad al-Sahb*, Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah Dimasyqiy, 1965
- Syams al-Dîn Abû 'Abdillâh Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahmân al-Tharâbalsiy al-Maghribiy, *Mawâhib al-Jalîl Li Syarh Mukhtashar al-Khalîl*, ttp.: Dar 'Âlim al-Kutub, 2003
- Syihâb al-Dîn Ahmad bin Idrîs al-Qarâfiy, *al-Dhâkhirah*, Beirut: Dâr al-Gharbiy, 1994
- Zaynuddîn bin Ibrâhîm bin al-Nujaym, *al-Bahr al-Râiq Syarh Kanz al-Daqâiq*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tth.